

Berkas Dakwaan Rampung

Mantan Hakim "Dikawal" Jaksa Kejati dan Kejari Gianyar

Denpasar (Bali Post) -

Pascadilakukan pelimpahan tahap II, berkas dakwaan dugaan korupsi tanah aset negara milik PU di Jalan By-pass Prof. Mantra dengan terdakwa mantan hakim I.B. Rai Pati Putra dikabarkan sudah rampung. Selain jaksa dari Kejati Bali yang akan menyidangkan sebagai jaksa dalam kasus ini juga melibatkan jaksa dari Kejari Gianyar. "Ya, ada jaksa dari Gianyar. Kalau tidak salah salah, Kasipidsus juga ikut sebagai jaksanya," kata salah seorang petugas Kejati Bali, Rabu (23/7) kemarin.

Setelah berkas dakwaan rampung, pekan ini langsung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Salah seorang jaksa, Harry Soetopo, tidak membantah hal itu. "Ya, pekan ini. Nanti kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, pasti kita kabari," jelasnya.

Sebelumnya, Aspidsus Polin O Sitanggang menjelaskan bahwa tersangka Rai Pati menghalangi-halangi penyidikan. "Kita sudah ingatkan. Dia ngotot bahwa itu adalah tanah atas sewa-menyewa. Padahal itu ilegal," jelas Polin O Sitanggang, beberapa waktu lalu.

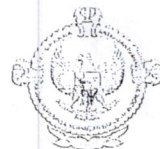
Bagaimana dengan keterangan tersangka yang mengatakan bahwa itu adalah tanah sewa yang sudah ditandatangani Bupati Gianyar? Pihak kejaksaan mengatakan, pihak penyidik sudah menjelaskan bahwa tanda tangan bupati tidak benar. "Pokoknya tidak sah. Itu bukan tanah pemkab. Namun, itu tanah PU," urai Polin O Sitanggang.

Dijelaskan bahwa selain sewa, tanah negara itu juga dijual oleh oknum. Mantan hakim ini menyewa kepada oknum yang juga sudah dibidik. "Ya, ini juga ada jual-beli. Kasusnya numpuk-numpuk," tegas O Sitanggang.

Meskipun tersangka ngotot bahwa dia nyewa dan uangnya masuk kas Pemkab Gianyar, itu hanya alasan tersangka. Mestinya, kata Polin, kalau sudah disita negara dalam perkara korupsi, yang bersangkutan mesti mundur. "Ini tanah sudah disita kejaksaan. Sekarang pelang dicoret. Mestinya dia mundurlah," tegas Polin. (kmb37)

Edisi : Kamis, 24 Agustus 27

Hal : 2



Tanah Pemprov di Unhi Jadi Temuan BPK Unhi Keberatan Bayar Sewa ✓

Denpasar (Bali Post) -

Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar selama ini memanfaatkan tanah Pemprov Bali untuk kampus dengan status hak guna pakai. Ini akhirnya menjadi temuan BPK RI tahun 2013 lalu lantaran tidak sesuai dengan regulasi pemanfaatan aset yang baru. Dalam hal ini, Unhi diharuskan membayar sewa atas pemanfaatan tanah Pemprov seluas 2.743 hektar.

"Kami sudah menyurati temuan itu, bahkan telah bersurat dengan yayasan dari Unhi dan terakhir ada audiensi dari pihak yayasan dengan gubernur terkait dengan besaran (sewa) yang kita tawarkan," ujar Kepala UPT Pengamanan Aset Pemprov Bali Ketut Nayaka saat mengikuti rapat dengan Pansus Aset DPRD Bali dan Unhi Denpasar di DPRD Bali, Kamis (24/8) kemarin.

Menurutnya, besaran sewa yang dikenakan Rp 20 ribu per meter persegi per tahun atau sekitar Rp 500 juta. Namun, dengan adanya Perda tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif itu bisa berkurang hingga setengahnya. Sebab, tarif yang diatur dalam perda untuk pendidikan bernuansa keagamaan besarnya Rp 10 ribu per meter persegi per tahun. Unhi merupakan universitas Hindu satu-satunya di Bali, bahkan Indonesia. "Rencana sekitar Rp 500 juta itu tinggal 50 persen atau kurang lebih Rp 274 juta per tahun," jelasnya.

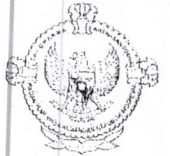
Pemprov sebetulnya telah mencoba berkoordinasi dengan BPK RI untuk mencari pola selain sewa. Misalnya memakai pola hibah. Namun, hibah sesuai ketentuan hanya bisa diberikan pada kegiatan yang bersifat

sosial, keagamaan dan pendidikan nonkomersial. "Harus ada audit dan laporan keuangan serta akta pendirian yang memang menyatakan yayasan itu nonprofit. Cuma yang mungkin menjadi pertimbangan, apabila yayasan ini ke depannya kami tidak tahu. Kemudian ada beberapa yayasan sudah menyewa, takutnya juga banyak nanti yang memohon (hibah)," tandas Nayaka.

Wakil Rektor III Unhi E. Dewi Yuliana mengatakan, Unhi selama ini memberikan beasiswa bagi 180 orang mahasiswa setiap tahunnya. Dalam proses pembelajaran, ada 168 dosen yang membantu. Kalaupun saat ini ada 3.000 mahasiswa yang membayar SPP Rp 1,2 juta, sejatinya belum cukup untuk menutupi gaji dosen dan karyawan. "Kalau sekarang lagi dibebankan dengan sewa seperti ini, saya rasa merupakan beban bagi kami," ungkapnya.

Ditambahkannya, Yayasan Pendidikan Widya Kerthi yang mengelola Unhi bukanlah milik perorangan atau pribadi. Akan tetapi merupakan milik umat lantaran berada di bawah naungan PHDI. Dengan demikian, tidak perlu ada kekhawatiran tanah Pemprov Bali ke depannya diperjualbelikan atau dialihkan.

Terkait masalah ini, Ketua Pansus Aset DPRD Bali I Nyoman Adnyana mengatakan, dewan sepakat dengan solusi pemberian hibah khusus untuk lembaga keumatan PHDI walaupun Unhi memiliki yayasan. Solusi ini diambil semata-mata untuk menjaga Unhi agar jangan sampai bubar, mengingat membawa misi keagamaan Bali dan agama Hindu khususnya. (kmb32)



Kejari Bidik Dugaan Penyimpangan Anggaran Bencana Pasar Badung

Denpasar (Bali Post) -

Ganjaran untuk penyelewengan dana bencana, apalagi bencana alam, ancaman hukumannya tidak tanggung-tanggung. Yakni ancaman hukuman mati, jika terbukti melakukan korupsi dana bencana alam. Kini, Kejari Denpasar sedang membidik dugaan penyimpangan dana anggaran bencana untuk kebakaran Pasar Badung yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kasipidsus Kejari Denpasar Tri Syahru Wira Kosadha membenarkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki adanya

dugaan penyalahgunaan anggaran bencana dalam relokasi Pasar Badung tersebut. Tim sudah melakukan langkah peng-

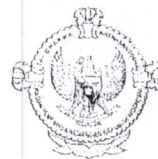
umpulan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata). Bahkan setelah melakukan pulbaket dan puldata, Syahru mengaku dalam waktu dekat ini akan melakukan ekspos terhadap persoalan itu. "Kita lakukan gelar perkara dulu," katanya, Rabu (23/8) kemarin. Informasi lain yang didapat, konon dana bencana yang turun tersebut nilainya Rp 2 miliar ke Pemkot Denpasar. Anggaran bencana dari pusat

yang turun ke BPBD Denpasar itu seharusnya digunakan untuk pembangunan pasar darurat untuk menampung pedagang yang kehilangan lapak di Pasar Badung yang terbakar. Oleh Pemkot Denpasar, pedagang dipindahkan ke eks Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto, Denpasar. "Ada informasi bahwa anggaran pusat itu salah sasaran. Ini yang sedang kita pelajari," jelas sumber jaksa lainnya.

Bahkan atas indikasi itu, sumber tadi mengatakan sejumlah pejabat di Pemkot Denpasar sudah ada yang dimintai keterangan, baik dari DTRP maupun BPBD. Bahkan juga dikabarkan ada rekanan yang segera dimintai keterangan. (kmb37)

Edisi : Kamis, 24 Agustus 2017

Hal : 2



Asosiasi BPK Sedunia Sepakat Laksanakan SDGs

Mangupura (Bali Post) -

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) turut menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak hanya BPK di Indonesia, tetapi juga asosiasi BPK sedunia atau INTOSAI.

BPK RI bersama 10 Supreme Audit Institution (SAI) kini melakukan pertemuan ke-9 guna membahas peran lembaga pemeriksa dalam mengimplementasikan SDGs di Kuta, Badung mulai Rabu (23/8) hingga Jumat (25/8) besok. "Kita sepakat untuk melaksanakan SDGs di masing-masing negara dan akhirnya untuk semua masyarakat di dunia ini biar sejahtera. Tidak ada lagi rakyat miskin, udara yang bersih, jadi semua sama," ujar Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, Rabu (23/8) kemarin.

Menurut Moermahadi, para peserta termasuk BPK RI yang mewakili 11 kelompok kerja (*working group*) INTOSAI berdiskusi tentang perkembangan tera-

khir dan tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2017-2019. BPK RI selaku Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA (*Working Group on Environmental Auditing*) wajib mempresentasikan perkembangan audit lingkungan. Dalam SDGs, lingkungan juga dijabarkan dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai hingga 2030. Selain kelompok kerja audit lingkungan, ada pula kelompok kerja IT audit, evaluasi program, utang publik, indikator nasional, audit pengadaan, audit industri ekstraktif dan *Big Data*. "Ada pengentasan kemiskinan, masalah lingkungan hidup, kesehatan, infrastruktur, jadi memang nyambung dengan rencananya pemerintah Indonesia khususnya Bappenas," jelasnya.

Peran BPK, lanjut Moermahadi, tentu saja melakukan pemeriksaan atau audit kinerja supaya tujuan SDGs bisa tercapai. BPK RI khususnya memang ti-

dak membentuk tim khusus. Upaya melakukan pemeriksaan pun masih dalam tahap persiapan. Namun, pihaknya mengaku sudah pernah melakukan komunikasi dengan Bappenas. Terlebih, sudah ada keppres untuk membuat rencana pembangunan berkelanjutan. "Tapi kan pemeriksaannya enggak mungkin hanya di Bappenas. Nanti aplikasinya juga di Kementerian, di daerah supaya tercapai di 2030. Tiap negara belum tentu 17 itu tercapai. Kalau negara yang maju, mungkin hanya beberapa. Kita saja sudah mulai, tidak bisa langsung 17-nya," imbuhnya seraya mengatakan, hasil pemeriksaan nantinya disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi.

Moermahadi menambahkan, pengukuran atas keberhasilan yang dicapai dari setiap negara penting untuk dilakukan. Sebab, hal ini akan membantu para pengambil kebijakan menyampaikan hasil dari setiap dan seluruh SDGs. (kmb32)